



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6396-6404

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Inderi Lara Safitri<sup>1✉</sup>, Titi Darmi<sup>2</sup>, Rosidin<sup>3</sup>, Sri Indarti<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: [Indrilarasafitri477@gmail.com](mailto:Indrilarasafitri477@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah ternak yang berkeliaran bebas masih menjadi isu utama di Kabupaten Mukomuko karena berpotensi menimbulkan kecelakaan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan personel Satpol PP, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal dengan memperhatikan aspek kultural dan struktural secara holistik.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Hewan Ternak, Van Meter dan Van Horn, Mukomuko*

## Abstract

The aim of this study is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 26 of 2011 of Mukomuko Regency concerning the Control of Livestock, as well as the influencing factors. The issue of free-roaming livestock remains a major concern in Mukomuko Regency due to its potential to cause traffic accidents, environmental damage, and social conflict. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the regulation has not been optimal, due to low public awareness, limited socialization of the policy, insufficient personnel in the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and weak inter-agency coordination. Recommendations include improving public outreach, providing supporting facilities, and involving community leaders in the implementation process. This study contributes to strengthening public policy implementation at the local level by taking into account both cultural and structural aspects in a holistic manner.

*Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Livestock, Van Meter and Van Horn, Mukomuko*

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat daerah. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan daerah adalah peraturan daerah (perda), yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menata kehidupan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Hastuti dan Anwar., 2021). Perda berfungsi sebagai alat pengendali dan pengarah terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam sektor peternakan yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara peternak dan masyarakat umum. Di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak sebagai respons atas maraknya permasalahan hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum, fasilitas publik, dan pemukiman warga. Hasil observasi Insari dan Safrida (2022) menunjukkan bahwa hewan ternak di wilayah ini sering dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai. Selain berdampak pada ketertiban umum, fenomena ini juga mengganggu estetika dan kebersihan lingkungan.

Data dari BPS Kabupaten Mukomuko tahun 2017 mencatat populasi ternak yang signifikan, yaitu sapi sebanyak 24.290 ekor, kerbau 3.801 ekor, dan kambing 16.539 ekor. Angka ini terus meningkat setiap tahun. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pertumbuhan jumlah ternak justru menimbulkan tantangan baru. Ternak yang dilepas secara liar kerap menjadi pemicu konflik antarwarga dan gangguan terhadap ketertiban umum (Latief dan Ka'bah, 2024). Sebagai respon atas permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak. Peraturan ini secara khusus mengatur larangan bagi pemilik ternak untuk melepas hewan mereka di lokasi-lokasi seperti jalan raya, area reboisasi,

pekarangan, hingga fasilitas publik. Pasal 6 Perda ini menegaskan bahwa ternak tidak boleh berkeliaran bebas karena dapat menimbulkan gangguan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Perda ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas peternakan dan kepentingan umum. Tujuannya tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya akibat ternak yang tidak terkontrol (Umar et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun jumlah petugas yang melakukan pengawasan. Seperti disebutkan oleh Latief dan Ka'bah (2024), infrastruktur pendukung seperti kandang penampungan sementara untuk ternak yang ditertibkan masih sangat terbatas. Kondisi ini menghambat proses penegakan hukum karena petugas tidak memiliki tempat untuk menahan hewan yang ditangkap. Selain itu, beberapa peternak masih memandang kebijakan ini bertentangan dengan kebiasaan mereka dalam memelihara ternak secara tradisional.

Konflik nilai juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebagian masyarakat menganggap melepas ternak adalah bagian dari budaya dan efisiensi pemeliharaan. Namun, masyarakat lain merasa terganggu karena ternak yang berkeliaran dapat merusak tanaman, menyebabkan kecelakaan, dan menciptakan ketidaknyamanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam implementasi kebijakan ini (Febriani dan Darmi., 2024). Sosialisasi dan edukasi menjadi elemen penting agar masyarakat memahami pentingnya kebijakan ini, tidak hanya karena takut sanksi, tetapi karena menyadari manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Peran tokoh adat, aparat desa, dan pemuka agama juga sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya penertiban hewan ternak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011, khususnya Pasal 6, yang mengatur larangan pelepasan ternak di wilayah-wilayah publik. Kajian ini akan menelaah sejauh mana kebijakan ini telah dijalankan, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan model implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Mukomuko.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara rinci implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mukomuko dengan fokus utama pada Satpol PP serta masyarakat pemilik hewan ternak dan masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti pejabat Satpol PP, aparat desa, serta masyarakat yang memiliki maupun tidak memiliki hewan ternak di wilayah terdampak. Informan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu metode pemilihan yang diawali dari satu atau dua orang informan utama, kemudian berkembang berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari tiga orang petugas Satpol PP dan delapan warga masyarakat, baik sebagai pemilik ternak maupun sebagai warga yang terdampak langsung oleh keberadaan ternak liar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai alat analisis utama untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Alasan utama pemilihan teori Van Meter dan Van Horn dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan lainnya karena teori Van Meter dan Van Horn memberikan struktur analisis yang lebih rinci dan terukur, serta mampu menjelaskan keterkaitan antar faktor implementasi secara langsung dan dinamis. Teori Van Meter dan Van Horn dianggap paling relevan karena menawarkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif terhadap proses implementasi kebijakan publik, dengan menekankan enam variabel utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan implementasi. Keenam variabel tersebut meliputi: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi pelaksana, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta (6) disposisi

pelaksana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memetakan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih terperinci. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan pendukung lainnya. Uraian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan keenam variabel utama dari teori Van Meter dan Van Horn, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan objektif mengenai pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Mukomuko. Berikut merupakan uraian hasil dan pembahasan berdasarkan keenam variabel teori Van Meter dan Van Horn (1975):

### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi fondasi awal dari keberhasilan implementasi. Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2011 memuat larangan terhadap aktivitas melepas ternak di tempat umum, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan lingkungan, dan keselamatan masyarakat. Namun, berdasarkan data primer, implementasi kebijakan belum didukung oleh indikator kinerja yang terukur. Satpol PP tidak memiliki target penertiban secara kuantitatif yang dijadikan acuan tahunan. Masyarakat pun menilai keberhasilan kebijakan hanya dari persepsi apakah masih ada ternak berkeliaran atau tidak, bukan dari data konkret yang menunjukkan dampak kebijakan tersebut. Hal ini menandakan bahwa standar operasional belum dijabarkan dengan baik dalam bentuk parameter yang objektif (Fiandi dan Sesmiarni, 2023).

### 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur maupun informasi. Temuan dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa jumlah personel Satpol PP sangat terbatas dalam menjangkau wilayah yang luas dan tersebar. Jumlah personel Satpol PP yang bertugas untuk mengawasi 15 kecamatan dan 149 desa di Kabupaten Mukomuko sangat tidak mencukupi. Dalam data sekunder yang dihimpun dari dokumen internal Satpol PP, diketahui bahwa alokasi anggaran khusus untuk kegiatan penertiban ternak juga tidak mencukupi. Selain itu, tidak tersedia kendaraan operasional maupun fasilitas seperti kandang penampungan. Dalam wawancara, beberapa petugas menyampaikan bahwa ternak yang ditertibkan kerap dilepaskan kembali karena tidak ada tempat yang layak untuk menampung. Dari sisi masyarakat, banyak pemilik ternak mengaku tidak memiliki cukup lahan maupun dana untuk membangun kandang, yang memperkuat kebutuhan akan pendekatan pemberdayaan dalam implementasi kebijakan ini

### 3. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat merupakan kunci penting dalam setiap proses implementasi. Dalam kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam data primer dari wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi implementasi perda. Sosialisasi kebijakan hanya dilakukan sesekali dan tidak menyeluruh, terutama ke desa-desa pelosok. Beberapa masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka baru mengetahui isi perda ketika petugas datang untuk melakukan penertiban. Kurangnya komunikasi horizontal antara Satpol PP dan aparat desa menyebabkan lemahnya keterlibatan lokal. Dalam dokumen perencanaan tahunan yang ditelaah (data sekunder), tidak ditemukan bukti pelaksanaan forum koordinasi lintas sektor secara berkala.

### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini, Satpol PP merupakan ujung tombak pelaksanaan perda. Struktur birokrasi Satpol PP relatif sentralistik, dengan wewenang eksekusi berada di tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan menjadi kurang fleksibel dan tidak adaptif terhadap kondisi lokal. Secara umum Petugas Satpol PP menunjukkan semangat dan pemahaman yang cukup baik terhadap perda, namun kinerja mereka dibatasi oleh regulasi birokrasi dan minimnya wewenang untuk bertindak cepat di lapangan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa tindakan penertiban harus melalui proses administratif dan koordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga proses menjadi lambat. Petunjuk teknis yang digunakan masih sangat formalistik dan kurang fleksibel untuk situasi darurat. Dalam observasi, ditemukan bahwa kegiatan patroli lebih fokus pada tindakan simbolik ketimbang pendekatan solutif, dan keberhasilan sering kali diukur dari jumlah patroli, bukan dari dampak nyata di lapangan.

### 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel lingkungan ini memberikan konteks terhadap pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Mukomuko merupakan daerah dengan dominasi penduduk di sektor pertanian dan peternakan. Kultur masyarakat yang menganggap bahwa membiarkan ternak berkeliaran adalah praktik wajar yang telah dilakukan turun-temurun menjadi tantangan besar dalam implementasi perda ini. Dari sisi ekonomi, data sekunder dari BPS menunjukkan bahwa sebagian besar peternak berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga kesulitan memenuhi standar pemeliharaan yang ditetapkan perda. Di sisi lain, secara politik, beberapa informan mengungkapkan bahwa penertiban ternak milik

tokoh berpengaruh sering kali tidak ditindak tegas, bahkan kadang diintervensi, sehingga menurunkan kredibilitas perda di mata masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan dukungan politik di tingkat lokal (Efiyanti et al., 2022).

#### 6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana terhadap kebijakan memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi. Disposisi ini mencakup pemahaman, motivasi, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan. Petugas Satpol PP secara umum memiliki pemahaman yang baik tentang isi dan urgensi perda. Berdasarkan hasil wawancara, petugas Satpol PP secara umum menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan ini dan mengakui urgensinya dalam menjaga ketertiban umum. Namun mereka merasa kurang didukung oleh fasilitas dan instrumen hukum yang cukup untuk bertindak tegas. Sebaliknya, masyarakat menunjukkan resistensi karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan perda. Beberapa warga menyebut perda ini hanya berpihak pada kepentingan elit, tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Nilai-nilai lokal tentang kebebasan ternak dan ekonomi subsisten masih kuat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara norma formal dan nilai sosial masyarakat. Dari segi intensitas, disposisi masyarakat terhadap peraturan ini rendah karena nilai yang dianut berbeda dengan nilai kebijakan. Nilai kolektif petani-peternak yang menganggap bahwa ternak adalah bagian dari kehidupan yang tidak harus dikurung berseberangan dengan nilai formal pemerintah mengenai ketertiban umum setempat (Astari et al., 2023).

### SIMPULAN

Penelitian Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum, jalan raya, dan pemukiman warga, yang menunjukkan lemahnya penegakan aturan serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Analisis berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa variabel sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan disposisi pelaksana menjadi faktor dominan penghambat implementasi kebijakan. Keterbatasan jumlah personel Satpol PP, tidak tersedianya kandang penampungan ternak, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, latar belakang sosial dan budaya masyarakat peternak yang menganggap menggembalakan ternak

sebagai hal biasa turut memperkuat resistensi terhadap kebijakan ini. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal. Penguatan sumber daya, penyusunan indikator kinerja, serta pelatihan bagi pelaksana kebijakan menjadi kunci penting. Dengan strategi yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan ketertiban umum, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mukomuko.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2), 92-113.
- Astari, A. N., Hasan, H., dan Suriyadi, S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 4(2), 186-195.
- Astari, A. N., Hasan, H., dan Suriyadi, S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 4(2), 186-195.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Mukomuko. 2023. Statistik Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Efiyanti, E., Indarti, S., dan Warlina, L. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Melalui Media Online Terhadap Pengetahuan Remaja Di Kota Banda Aceh. *The Journalish: Social and Government*, 3(2), 150-159.
- Febriani, I., dan Darmi, T. (2024). Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu. *Journal Of Social Politics And Public Adminitration*, 1(1), 85-94.
- Fiandi, A., Dan Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi Standar Mutu Dan Sasaran Mutu Pada Lembaga Pendidikan. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 4 (1), 34-40.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101.
- Insari, R. D., dan Safrida, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 146-153.
- Latief, F. H., dan Ka'bah, S. (2024). Polemik Penegakan Peraturan Daerah Tentang

Penertiban Hewan Ternak Oleh Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai. *Mitita Jurnal Penelitian*, 2(2), 54- 62.

Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.

Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi kebijakan dalam otonomi daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406-1417.

Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).

Umar, N., Sri, Y, M., Fenti, P, D., dan Dance. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas. *Jurnal Adminisitrasi dan publik*, 4(1), 10-21.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Wijaya, F. A., Hasan, H., dan Sohrah, S. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Hukum Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 4(3), 284-293.